

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Suatu instansi/perusahaan yang semakin besar dan berkembang mengakibatkan rentang kendali dan upaya pengawasan yang semakin besar pula. Dalam kondisi seperti ini, perlu dilakukan upaya pengawasan yang komprehensif guna mencegah atau menindak pelanggaran atau penyimpangan yang dimungkinkan terjadi. Manajemen bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan instansi/perusahaan dari perencanaan sampai pada pengawasannya sehingga tujuan instansi/perusahaan dapat tercapai seperti yang telah ditetapkan.

Manajemen membentuk suatu sistem pengendalian manajemen agar para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi/perusahaan. Pengendalian manajemen tersebut meliputi sistem instansi/perusahaan, kebijakan, prosedur-prosedur, praktik-praktik yang diterapkan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas instansi/perusahaan agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka menjamin tercapai tujuan instansi/perusahaan.

Standar Profesional Akuntan Publik (2001 : 319.2) telah menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dirancang

untuk mengamankan harta kekayaan milik badan usaha dan menjamin tercapainya tujuan badan usaha yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah audit kepatuhan atau disebut juga dengan *compliance audit*. Pada suatu departemen di pemerintahan, pelaksanaan audit kepatuhan salah satunya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal bertugas untuk menemukan ketidakefisienan atau ketidakefektifan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada suatu departemen. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good public governance*). Audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah pada departemen dilakukan oleh auditor Inspektorat Jenderal. Auditor melakukan tugasnya berdasarkan standar-standar audit yang telah ditetapkan dalam hal ini standar audit yang berlaku adalah Standar Audit Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (SAINS) yang dijadikan pedoman. Adanya ketidakpuasan dari pihak auditee (instansi yang diaudit) atas Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam kinerja auditor atau pelaksanaan audit yang dilakukan. Ketidakpuasan atas hasil audit yang dihasilkan seperti misalnya adanya ketidakpahaman auditor atas *business process* yang dilakukan oleh auditee.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang evaluasi pelaksanaan audit kepatuhan yang dilakukan oleh auditor pada Inspektorat

Jenderal Departemen Keuangan apakah telah sesuai dan mengikuti standar audit yang telah ditetapkan (SAINS) dan untuk mengevaluasi pelaksanaan audit kepatuhan yang telah dilakukan, penulis mengambil contoh pelaksanaan atas audit kepatuhan atas prosedur penggajian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hasil dari penelitian dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman serta waktu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mencoba untuk membatasi ruang lingkup yang akan diteliti dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.

Pada penelitian ini, penulis akan mencoba membahas mengenai pelaksanaan audit kepatuhan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan atas prosedur penggajian pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara apakah telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai pedoman/acuan (Standar Audit Inspektorat Jenderal/SAINS). Penulis membatasi masalah hanya pada evaluasi atas pelaksanaan audit kepatuhan

yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atas prosedur pembayaran gaji Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya pembayaran gaji induk pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2007.

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit kepatuhan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terhadap prosedur penggajian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ?
2. Apakah pelaksanaan audit kepatuhan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan atas prosedur penggajian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah sesuai dengan pedoman/standar audit yang berlaku ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit kepatuhan atas prosedur penggajian oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit kepatuhan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan atas prosedur penggajian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah sesuai dengan pedoman/standar audit yang berlaku.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
 - b. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai pelaksanaan pengendalian intern pada umumnya dan pelaksanaan audit kepatuhan (*audit compliance*) pada khususnya.

2. Bagi Instansi

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi untuk mengetahui apakah telah dipatuhinya prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh instansi.

3. Bagi kalangan umum

Bagi kalangan umum khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi kiranya dapat dijadikan suatu referensi atau bahan acuan untuk penelitian di bidang *auditing*.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tersusun atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulisan, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang uraian singkat mengenai teori-teori yang berkaitan dengan akuntansi, auditing, pemeriksaan operasional dan pengendalian internal serta variabel-variabel yang merupakan rangkuman dari tinjauan pustaka serta kerangka pikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data dan definisi operasional variabel.

BAB IV : TINJAUAN UMUM INSTANSI

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat, kegiatan usaha, wewenang dan tanggung jawab, dan struktur organisasi instansi.

BAB V : PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menguraikan hasil penelitian yaitu pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan audit kepatuhan atas prosedur penggajian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan apakah telah sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.